

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk membawa perubahan kearah yang lebih baik serta mendorong pemerataan pembangunan guna menggali dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi yang dimiliki secara optimal (Darmanto & Mildawati, 2015). Dalam melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan kemakmuran rakyat, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sumber-sumber pembiayaan yang cukup sangat dibutuhkan pemerintah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah perlu menggali sendiri sumber pendanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang perlu dilakukan untuk memperoleh pendanaan yaitu berasal dari sektor pajak. Sektor pajak ini bertujuan untuk meningkatkan potensi penerimaan dari Negara Indonesia itu sendiri.

Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuannya dalam memperoleh pendapatan langsung dan tidak langsung guna membiayai pengeluaran rutin, pembangunan nasional, dan pertumbuhan ekonomi daerah (Furqaan, 2020). Menurut lembaga pemungutan, pajak terbagi menjadi dua kategori yaitu pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya berada di tangan pemerintah pusat, dan yang dipungut oleh pemerintah daerah merupakan pajak daerah (Rotinsulu *et al.*, 2018). Pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama, karena untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sebagai wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan

memaksimalkan potensinya sehingga kewenangan tersebut mampu mendorong daerah untuk berkembang secara sehat dan kompetitif dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup besar yaitu berasal dari sektor pajak daerah. Dalam hal menghasilkan pendapatan bagi kas daerah, pajak hotel dan pajak reklame merupakan dua sumber pendapatan daerah yang potensial. Hotel dan reklame memiliki peran yang kuat dalam pendapatan di Kabupaten Klaten. Kedua pajak tersebut sangat penting untuk kelangsungan dan kelancaran pembangunan. Dengan begitu pendapatan asli daerah dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat (Tamara *et al.*, 2022).

Permasalahan umum yang dihadapi pada sektor pajak hotel dan pajak reklame adalah masih banyak yang enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena rendahnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak, masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak tersebut, kurangnya kesadaran sebagian wajib pajak dalam membayar pajaknya tepat waktu serta masih ada reklame-reklame yang belum didaftarkan oleh wajib pajak reklame atau juga belum dapat terjangkau oleh petugas pendaftaran dan pendataan. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat luas mengenai masalah perpajakan serta kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan industri perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengambil judul penelitian tentang "**Analisis Komparasi Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dengan Pajak Reklame (Studi Kasus pada BPKPAD Kabupaten Klaten).**"

B. Batasan Masalah Penelitian

Pada penelitian ini batasan masalah yang menjadi fokus bahasan yaitu perbandingan prosedur pemungutan pajak hotel dengan pajak reklame dan kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut di BPKPAD Kabupaten Klaten.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, masalah yang dirumuskan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemungutan pajak hotel dan pajak reklame di BPKPAD Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana komparasi prosedur pemungutan pajak hotel dengan pajak reklame di BPKPAD Kabupaten Klaten?
3. Kendala apa saja yang dihadapi pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel dan pajak reklame?
4. Bagaimana solusi untuk meminimalisir kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak reklame?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Memahami prosedur pemungutan pajak hotel dan pajak reklame di BPKPAD Kabupaten Klaten.
2. Mengetahui perbandingan prosedur pemungutan pajak hotel dengan pajak reklame di BPKPAD Kabupaten Klaten.
3. Mengidentifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak reklame yang dihadapi pemerintah Kabupaten Klaten.
4. Mengetahui solusi untuk kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak reklame.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kajian ilmu yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang prosedur pemungutan pajak hotel dan pajak reklame dengan analisis komparasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi instansi untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak kepada masyarakat luas.